

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan laporan mengalami peningkatan tekanan inflasi, berada diatas level sasaran target inflasi nasional ($3,00 \pm 1\%$ (yoy)). Inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada triwulan III 2022 tercatat 6,73% (yoy), meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan II 2022, yaitu 5,12% (yoy) dan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 1,90% (yoy). Secara kumulatif, inflasi tahun berjalan sebesar 5,55% (ytd), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 1,08% (ytd). Secara umum, Inflasi Sulawesi Tengah menunjukkan tren meningkat dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada triwulan III 2022 yang mengalami peningkatan tekanan tinggi akibat penyesuaian harga komoditas energi oleh pemerintah karena lebarnya disparitas harga yang bersumber dari eksternal (global).

Top 3 Komoditas dengan andil penyumbang inflasi tertinggi hingga akhir tahun 2022

1. Bensin 0.83% (ytd)
2. Bahan Bakar Rumah Tangga 0.60% (ytd)
3. Tukang Bukan Mandor 0,54% (ytd)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari sisi eksternal peningkatan tekanan inflasi terjadi akibat peningkatan demand yang didorong oleh pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19, kenaikan harga energi dan pangan serta eskalasi perang Rusia - Ukraina yang mengganggu rantai pasokan dunia dan mendorong berbagai negara melakukan kebijakan protektionisme pangan. Di sisi internal, peningkatan mobilitas masyarakat, baik di Kota Luwuk dan Kota Palu turut mendorong peningkatan inflasi akibat mismatch antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) pasca pelonggaran aktivitas masyarakat secara luas dan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi di awal Bulan September 2022, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok transportasi, dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.

Tekanan inflasi tahunan pada di triwulan laporan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tekanan inflasi dari triwulan sebelumnya. Di sisi penawaran tekanan dirasakan pada komoditas tarif angkutan udara, bensin, bahan bakar rumah tangga (LPG) dan beberapa komoditas inti efek domino dari kenaikan inflasi pada kelompok administered price dan volatile foods. Dari sisi permintaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada dalam zona optimis yang didorong oleh capaian vaksinasi, pelonggaran aktifitas masyarakat secara luas, pelaksanaan event daerah dan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada triwulan laporan, peningkatan tekanan inflasi dari faktor penawaran terutama terjadi pada kelompok administered price dan volatile food. Kelompok komoditas administered price mengalami inflasi tertinggi sebesar 19,34% (yoy), diikuti kelompok volatile food sebesar 6,09% (yoy). Tingginya harga acuan global komoditas energi, dimana harga minyak mentah sempat mencapai harga tertinggi sejak pandemi (US\$130/barrel), memaksa Pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar transportasi non subsidi serta harga bahan bakar rumah tangga (LPG). Kebijakan penyesuaian harga BBM Subsidi pada September 2022 memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun telah dilakukannya penyesuaian harga, Kenaikan harga bahan bakar tersebut belum mencapai harga keekonomiannya menyebabkan disparitas harga yang cukup lebar dengan

komoditas non subsidi sehingga masih terjadi kelangkaan di beberapa daerah dan berujung pada gangguan distribusi barang dan jasa termasuk mendorong peningkatan biaya logistik. Gangguan tersebut juga menjadi permasalahan utama di sektor pertanian dan perikanan, dimana terjadi peningkatan Harga Pokok Produksi (HPP) di setiap rantai pasok sehingga meningkatkan risiko kenaikan harga komoditas secara luas. Sementara itu pelonggaran aktivitas masyarakat dan tingginya harga avtur di tengah belum kembali normalnya jumlah armada yang beroperasi seperti sebelum pandemi mendorong peningkatan harga tarif angkutan udara. Pada kelompok volatile foods, komoditas minyak goreng masih memberikan andil besar terhadap inflasi triwulan III 2022, meskipun mengalami tren penurunan. Di sisi lain, gangguan produksi akibat cuaca seperti pada produksi perikanan tangkap maupun hortikultura yang terjadi pada triwulan laporan turut menyebabkan tekanan pada sisi penawaran.

Tekanan inflasi dari faktor permintaan terindikasi mengalami peningkatan sejalan dengan masih optimisnya masyarakat terhadap kondisi ekonomi, meskipun tidak lebih dominan dari faktor penawaran. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan laporan masih berada pada level optimis. Membaiknya perekonomian global dan nasional, program bantuan sosial pemerintah, pelonggaran mobilitas masyarakat secara lebih luas pada triwulan laporan berdampak pada naiknya permintaan komoditas tiket angkutan udara dan produk kelompok penyedia makanan dan minuman. Selain itu, kembali dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar tatap muka, perkuliahan serta aktivitas perkantoran secara luring yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang masih sangat terbatas dan masyarakat cenderung mengikuti kegiatan tersebut dari jarak jauh (daring). Hal tersebut di perkirakan meningkatkan demand rumah kontrak/sewa.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pengendalian harga dalam kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Beberapa hal yang telah dilakukan TPID selama triwulan III 2022 antara lain :

Ketersediaan Pasokan

- a. Terus dilakukannya perluasan Implementasi teknologi hazton untuk meningkatkan produksi padi di Sulawesi Tengah.
- b. Koordinasi dan komunikasi Pemda dengan Pertamina sebagai upaya penambahan kuota dan dukungan pasokan Bahan Bakar Minyak.
- c. Kerjasama Antar Daerah (KAD) intraprovinci dan antarprowinsi dan pemberian bantuan angkut komoditas untuk menjaga ketersediaan stok di pasar.

Kestabilan Harga

- a. Penyelenggaraan Pasar Murah oleh Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan bersinergi dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah secara berkala serta terus dilaksanakannya monitoring harian harga sembako utamanya di pasar tradisional utama.

Kelancaran Distribusi

- a. Terus dilaksanakannya pengawasan distribusi bahan pokok penting dan bahan pokok lainnya serta LPG untuk memastikan kelancaran distribusi kepada masyarakat. Selain itu, himbauan untuk memprioritaskan bahan pangan dalam bongkar muat logistik di pelabuhan terus dilaksanakan.
- b. Selain itu TPID terus memperkuat sinergi dalam berkoordinasi dengan SPBU terkait

pengetatan aturan dan pengawasan penjualan BBM agar tepat sasaran dan memitigasi antrian panjang di SPBU

Komunikasi Efektif

- a. Himbauan berbelanja dengan bijak dan membeli produk UMKM utamanya bawang olahan dan cabai olahan Pada kegiatan yang mengumpulkan banyak masyarakat.
- b. Pelaksanaan HLM TPID Luwuk dengan hasil komitmen pemerintah Banggai untuk melakukan relokasi anggaran daerah (APBD) pada program-program pengendalian inflasi.
- c. Pelaksanaan HLM TPID Kota Palu dengan hasil rencana pemerintah kota palu untuk mendorong peningkatan peran perusda sebagai offtaker.
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan forkopimda terkait asesmen inflasi terkini dan usulan strategi yang dapat diimplementasikan untuk menekan angka inflasi di Sulawesi Tengah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan laporan Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan tekanan, tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Berbagai faktor yang bersumber dari eksternal yang selanjutnya berdampak pada sisi internal Provinsi Sulawesi Tengah mendorong peningkatan tinggi tekanan inflasi Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan TPID tidak berdampak signifikan terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah, akibat kompleksitas yang terjadi di tahun 2022 dan menyeluruh di daerah sekitar. Sumber peningkatan inflasi pada triwulan laporan utamanya dipengaruhi oleh tingginya harga acuan energi global yang mendorong Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi akibat tingginya disparitas harga. TPID Provinsi Sulawesi Tengah berusaha memitigasi dampak kenaikan BBM melalui inisiasi pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat, Pertamina dan Hiswana Migas sebagai upaya antisipasi dan mitigasi kenaikan tekanan pada kelompok transportasi dan bahan bakar rumah tangga. Namun demikian, tidak adanya kewenangan Pemda pada penagturan harga menyebabkan kenaikan inflasi tinggi tidak terelakan. Secara lebih rinci, berdasarkan disagregasi inflasi, kelompok core inflation terkendali dalam rentang $3\% \pm 1\%$. Sementara kelompok volatile food berada pada level 6,09%. Selanjutnya Adm. Price mengalami peningkatan tinggi pada kisaran 19,34% seiring terus meningkatnya harga-harga komoditas yang diatur oleh pemerintah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Program pengendalian inflasi TPID Kota/Kabupaten/Provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat difokuskan untuk memperkuat ketersediaan pasokan melalui penggunaan teknologi digital untuk pertanian dan realisasi KAD, keterjangkauan harga melalui implementasi perdagangan digital untuk menunjang pasar murah, regulasi yang mendukung kelancaran distribusi serta koordinasi untuk pemantauan pasokan dan harga bahan pangan.

- Ketersediaan Pasokan

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dengan implementasi metode tanam yang juga mampu meningkatkan kualitas produk.

Penerapan Urban Farming: Mendorong Masyarakat untuk secara kontinyu menanam komoditas utama penyumbang inflasi melalui kemandirian pangan Rumah Tangga (Contoh: Kelompok Masyarakat Lorong Sintuvu)

Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan bantuan tepat guna, misalnya dengan inisiasi

kapal untuk kelompok nelayan yang bisa digunakan melaut jauh

Meningkatkan KAD melalui business matching yang diperkuat dengan MoU antar daerah dengan Provinsi lain baik secara B2B/G2G.

Memaksimalkan keberadaan resi gudang dan meningkatkan peran BUMN, BUMD dan BUMDES sebagai mitra petani

- Keterjangkauan Harga

Secara rutin melaksanakan survei pemantauan harga pasar melalui PIHPS maupun sidak lapangan yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah.

Implementasi perdagangan digital melalui e-commerce lokal/Grab/Go-Jek dan mengoptimalkan peran platform tani online sebagai kios penyeimbang yang juga terhubung dengan aplikasi marketplace dan ojek online.

Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana produksi komoditas penting daerah sesuai kebutuhan petani dengan tingkat harga yang wajar

Meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah komoditas bahan pangan utama baik secara online dan offline utamanya sebelum mendekati HBKN atau pada saat terjadi gejolak harga di Masyarakat

- Kelancaran Distribusi

Memastikan distribusi barang antar provinsi untuk komoditas strategis berjalan lancar, baik darat, maupun laut.

Meningkatkan koordinasi dengan BUMN untuk kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka memastikan pasokan terjaga sehingga tidak terjadi gangguan distribusi barang.

Meningkatkan peran pelabuhan, a.l memberikan prioritas bongkar-muat bagi barang/komoditas pangan strategis utamanya bahan pokok dibandingkan komoditas lainnya. Melakukan upaya digitalisasi melalui aplikasi e-commerce lokal dalam rangka memudahkan masyarakat menerima bahan pangan.

Mewujudkan digitalisasi informasi pangan agar diperoleh data yang faktual mengenai surplus dan defisit masing-masing daerah untuk mendukung perdagangan antar daerah.

- Komunikasi Efektif

Pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui Komunikasi pimpinan daerah ke media masa.

Melaksanakan Sosialisasi melalui berbagai platform digital termasuk media sosial terkait informasi harga pangan strategis dan tingkat ketersediannya

Mensinergikan Program pengendalian Inflasi yang telah disusun oleh TPID Prov dan Kab/Kota dengan program kerja OPD terkait

Koordinasi dan sinergi antara beberapa institusi seperti BUMN, BUMD dan Bumdes serta lembaga terkait dalam rangka pengendalian inflasi untuk menyusun program strategis pengendalian inflasi daerah.